

DESENTRALISASI FISKAL DAN KETIMPANGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA : SLR

Hasna Mutia Insani¹, Dwi Cahyaningdyah², Martono³

^{1,2,3}Manajemen Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang

[1hasnamutia45@students.unnes.ac.id](mailto:hasnamutia45@students.unnes.ac.id) ,

[2dcahyaningdyah@mail.unnes.ac.id](mailto:dcahyaningdyah@mail.unnes.ac.id), [3martono@mail.unnes.ac.id](mailto:martono@mail.unnes.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between fiscal decentralization and disparities in education funding in Indonesia using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The issue underlying this study is the persistent disparity in education funding across regions, despite the fact that fiscal decentralization policies have granted local governments greater authority to manage education budgets. The study was conducted by reviewing scientific articles published between 2022 and 2026, resulting in 10 articles that met the inclusion criteria. Data were collected from academic databases such as Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, SINTA, and GARUDA, and then analyzed using content analysis techniques to identify the main themes of the research. The synthesis results indicate that disparities in local fiscal capacity are the dominant factor causing disparities in education funding. Furthermore, fiscal transfers from the central government have not been fully effective in reducing these disparities, as differences in fiscal capacity, governance quality, and the effectiveness of budget management still exist across regions. Although fiscal decentralization has increased the flexibility and participation of local governments in the delivery of education, this policy has not yet been able to optimally achieve equitable education funding. Therefore, it is necessary to reformulate the education financing model through a needs-based financing approach, strengthen performance-based fiscal transfers, enhance local fiscal capacity, and strengthen the accountability and oversight systems for education budgets in order to support equitable access to and quality of education in Indonesia

Keywords: *Fiscal Decentralization, Education Funding, Educational Inequality, Education in Indonesia, Systematic Literature Review*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan pembiayaan pendidikan di Indonesia melalui pendekatan Tinjauan Pustaka Sistematis. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih terjadinya kesenjangan pembiayaan pendidikan antar daerah meskipun kebijakan desentralisasi fiskal telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendidikan. Penelitian dilakukan dengan menelaah artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2022–2026 dan diperoleh 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Data dikumpulkan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, SINTA, dan GARUDA, kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi tema-tema utama penelitian. Hasil sintesis

menunjukkan bahwa ketimpangan kapasitas fiskal daerah merupakan faktor dominan yang menyebabkan ketimpangan pembiayaan pendidikan. Selain itu, transfer fiskal dari pemerintah pusat belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kesenjangan karena masih terdapat perbedaan kapasitas fiskal, kualitas tata kelola, serta efektivitas pengelolaan anggaran di masing-masing daerah. Meskipun desentralisasi fiskal meningkatkan fleksibilitas dan partisipasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, kebijakan ini belum mampu mewujudkan pemerataan pembiayaan pendidikan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi model pembiayaan pendidikan melalui pendekatan pendanaan berbasis kebutuhan, penguatan transfer fiskal berbasis kinerja, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan anggaran pendidikan guna mendukung pemerataan akses dan mutu pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Pembiayaan Pendidikan, Ketimpangan Pendidikan, Pendidikan Indonesia, Tinjauan Pustaka Sistematis

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan investasi strategis yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, upaya peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh aspek kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sistem pembiayaan pendidikan yang mampu menjamin pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah (Sari et al., 2026). Pembiayaan pendidikan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional karena melalui alokasi sumber daya keuangan yang memadai, pemerintah dapat menyediakan layanan

pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah pada awal tahun 2000-an, Indonesia mengadopsi sistem desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan dan penyelenggaraan layanan publik, termasuk sektor pendidikan (Anwar, 2023). Desentralisasi fiskal pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah melalui mekanisme pengelolaan anggaran yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat local (Wahyudi et al., 2023). Namun, implementasi desentralisasi fiskal juga

menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait perbedaan kapasitas fiskal antar daerah yang berdampak pada ketimpangan pembiayaan pendidikan.

Teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat (Panggabean et al., 2025). Akan tetapi, efektivitas desentralisasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, kemampuan manajerial, serta kualitas tata kelola daerah. Ketika kapasitas fiskal antar daerah tidak merata, desentralisasi justru berpotensi memperlebar kesenjangan layanan publik, termasuk layanan pendidikan. Runiasih & Ahmad, (2025) mengemukakan bahwa daerah dengan pendapatan asli daerah yang tinggi memiliki kemampuan lebih besar untuk mengalokasikan anggaran pendidikan, sementara daerah dengan kapasitas fiskal rendah sering kali mengalami keterbatasan dalam penyediaan sarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, maupun

pengembangan program pembelajaran.

Fenomena ketimpangan pembiayaan pendidikan masih menjadi isu krusial dalam sistem pendidikan Indonesia. Meskipun pemerintah telah menetapkan alokasi minimal 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD, distribusi sumber daya pendidikan belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan layanan pendidikan. Farosa et al. (2026), menunjukkan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kesenjangan pembiayaan pendidikan karena perbedaan kapasitas fiskal, kualitas tata kelola, serta efektivitas penggunaan anggaran di masing-masing daerah. Daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah cenderung mengalami keterbatasan dalam penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas dibandingkan daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih kuat.

Permasalahan tersebut semakin kompleks apabila dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan beragam. Ketimpangan pembangunan antarwilayah menyebabkan akses

terhadap layanan pendidikan yang berkualitas masih belum merata. Beberapa daerah perkotaan mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang relatif lengkap dengan dukungan anggaran yang memadai, sedangkan daerah terpencil dan tertinggal masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun dukungan pembiayaan (Bilqis et al., 2026). Akibatnya, tujuan desentralisasi fiskal untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai dalam sektor pendidikan.

Alfiansyah, (2026) menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan pembiayaan pendidikan. Az-zahwa et al. (2026), menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan dan memperluas akses pendidikan melalui penguatan peran pemerintah daerah. Namun, Apriliansyah et al. (2025), menemukan bahwa ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah justru memperbesar disparitas pembiayaan pendidikan sehingga berdampak pada perbedaan kualitas layanan

pendidikan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai desentralisasi fiskal dan ketimpangan pembiayaan pendidikan masih memerlukan sintesis yang komprehensif untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan penelitian, faktor penyebab, dampak, serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mampu mengintegrasikan berbagai hasil penelitian terkait desentralisasi fiskal dan ketimpangan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini berupaya mengidentifikasi karakteristik penelitian yang telah dilakukan, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pembiayaan pendidikan pada era desentralisasi fiskal, serta mensintesis berbagai temuan mengenai dampak dan strategi yang direkomendasikan untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan sintesis secara sistematis, transparan, dan komprehensif terhadap berbagai penelitian yang

relevan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang dikaji.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis berbagai penelitian yang membahas desentralisasi fiskal dan ketimpangan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Metode SLR dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan telah dipublikasikan secara ilmiah (Marlina, 2025).

Proses pencarian literatur dilakukan melalui beberapa basis data akademik, seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, SINTA, dan GARUDA. Pencarian menggunakan kata kunci desentralisasi fiskal, pembiayaan pendidikan, dan ketimpangan pembiayaan pendidikan. Artikel yang dipilih dibatasi pada publikasi tahun 2022–2026 agar memperoleh informasi yang mutakhir dan sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Kriteria inklusi penelitian meliputi artikel ilmiah yang membahas hubungan desentralisasi fiskal dengan pembiayaan pendidikan, tersedia dalam bentuk *full text*, serta memiliki relevansi dengan konteks pendidikan di Indonesia. Sementara itu, artikel yang tidak berkaitan dengan sektor pendidikan, tidak tersedia secara lengkap, atau memiliki kesamaan data dengan penelitian lain dikeluarkan dari proses analisis.

Artikel yang memenuhi kriteria kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Data yang diekstraksi mencakup penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta temuan utama penelitian (Arif et al., 2025). Selanjutnya, hasil penelitian dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan faktor penyebab ketimpangan pembiayaan pendidikan, dampak desentralisasi fiskal, dan strategi pemerataan pembiayaan pendidikan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan proses *Systematic Literature Review* (SLR), diperoleh 10 artikel utama yang memenuhi kriteria

inklusi, yaitu diterbitkan pada periode 2022–2026, membahas desentralisasi fiskal, transfer fiskal daerah, dan ketimpangan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Analisis dilakukan terhadap peneliti & tahun, fokus penelitian, metode dan temuan penelitian dapat dilihat di table sebagai berikut :

Tabel 1 Sintesis Temuan Penelitian Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Penelitian				
(Dian & Kirana, 2026)	Pengaruh transfer intergovernmental terhadap disiplin fiskal pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi fiskal.	Systematic Literature Review (SLR) dengan pedoman PRISMA 2020.	Dana transfer yang dominan meningkatkan keterangan fiskal daerah, menurun kan insentif peningkatan PAD, serta memunculkan indikasi moral hazard dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekolah negeri di perkotaan memperoleh pendanaan lebih stabil	(Ramadhani et al., 2025)	Peran desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia	Studi literatur dengan analisis deskriptif kuantitatif.	Desentralisasi fiskal meningkatkan efektivitas pelayanan publik, namun memerlukan ketimpangan pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah karena keterbatasan PAD dan lemahnya tata kelola keuangan daerah. Desentralisasi fiskal
(Apriliansyah et al., 2025)	Kesenjangan pembiayaan pendidikan antara sekolah negeri dan	Studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif		(Alfiansyah, 2026)	Disparitas pembangunan	Literature Review	

	regional dalam era desentralisasi fiskal melalui perspektif konvergensi ekonomi dan investasi publik.	terhadap artikel ilmiah periode 2020–2025.	menghasilkan dampak yang beragam . Ketimpangan regional masih tinggi akibat perbedaan kapasitas fiskal, kualitas institusi, dan distribusi investasi publik yang tidak merata. Terdapat disparitas signifikan belanja pendidikan per kapita antara daerah dengan PAD tinggi dan rendah. Dana transfer pusat belum efektif mengurangi kesenjangan karena minimnya fleksibilitas dan insentif berbasis kinerja.	(Hayida-o & Wayong, 2025)	Membandingkan sistem pembiayaan pendidikan sebelum dan sesudah penerapan otonomi daerah serta menganalisis efektivitasnya terhadap peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia .	Penelitian kepustakaan (<i>library research</i>)	Otonomi daerah meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas pembiayaan pendidikan melalui kewenangan daerah yang lebih besar, meskipun masih menghadapi tantangan ketimpangan fiskal dan kapasitas pengelolaan antar daerah. Desain desentralisasi fiskal belum mewujudkan keadilan distributif. Ketimpangan terjadi secara vertikal (pusat-daerah), horizontal (antar daerah), dan institusional (sekolah
(Runisah & Ahmad, 2025)	Ketimpangan pembiayaan pendidikan antar daerah dalam konteks desentralisasi fiskal dan pemerataan akses pendidikan.	Systematic Literature Review (SLR) dengan koding tematik.		(Meihadi & Rosidin, 2026)	Ketimpangan otonomi fiskal dalam pembiayaan sekolah dan madrasah sebagai kritik terhadap desain desentralisasi pendidikan.	Yuridis normatif dengan pendektan perundang-dan konseptual.	

			negeri, swasta, dan madrasah). Kapasitas fiskal daerah yang berbeda menghasilkan disparitas layanan pendidikan.				aan akses dan kualitas pendidikan.
			Desentralisasi fiskal belum mampu mewujudkan pemerataan pendidikan karena adanya ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah. Diperlukan model pembiayaan berbasis kebutuhan daerah (needs-based financing) dan penguatan sistem evaluasi berbasis kinerja untuk meningkatkan pemerataan	(Yusuf & Hanif, 2025)	Dampak desentralisasi pendidikan terhadap ketimpangan akses pendidikan di Indonesia	Kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan analisis dokumen.	Desentralisasi pendidikan meningkatkan partisipasi daerah dalam pengelolaan pendidikan, namun belum mampu mengurangi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan secara signifikan. Ketimpangan dipengaruhi oleh distribusi anggaran yang tidak merata, keterbatasan infrastruktur, dan kapasitas daerah yang berbeda.
(Marjoni, 2025)	Reformulasi model pembiayaan pendidikan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan pada era desentralisasi fiskal.	Pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory menggunakan data sekunder kabupaten/kota di Indonesia.		(Sumiyana & Effendi, 2024)	Analisis sistem gangguan pendidikan dasar di Indonesia	Penelitian kualitatif melalui wawancara semi-	Sistem penganggaran pendidikan di Indonesia dinilai

dalam konteks desentralisasi fiskal.	terstruktur	kurang adaptif dalam menciptakan pemerataan pendanaan sekolah dasar. Transfer fiskal dan alokasi anggaran belum mampu mengatasi ketimpangan antar daerah karena lemahnya regulasi dan rendahnya fleksibilitas pengelolaan anggaran pendidikan.	artikel) mengidentifikasi perbedaan kapasitas fiskal daerah sebagai faktor dominan penyebab ketimpangan pembiayaan pendidikan. Selain itu, 70% artikel menyoroti belum optimalnya transfer fiskal pemerintah pusat dalam mengurangi kesenjangan antar daerah, sedangkan 60% artikel menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
--------------------------------------	-------------	--	--

Berdasarkan Tabel 1, hasil sintesis terhadap 10 artikel menunjukkan bahwa tema utama penelitian dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu ketimpangan kapasitas fiskal daerah, efektivitas transfer fiskal pendidikan, dampak desentralisasi fiskal terhadap pemerataan pendidikan, dan strategi reformasi pembiayaan pendidikan. Sebanyak 80% artikel (8 dari 10

Secara umum, pola temuan penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak positif berupa meningkatnya fleksibilitas dan partisipasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, mayoritas penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut belum mampu mewujudkan pemerataan pembiayaan pendidikan secara optimal akibat ketimpangan kapasitas fiskal, distribusi anggaran yang belum berbasis kebutuhan, serta rendahnya efektivitas transfer fiskal. Oleh karena itu, sebagian besar penelitian merekomendasikan reformulasi model pembiayaan pendidikan melalui pendekatan *needs-based financing*, penguatan sistem evaluasi berbasis kinerja, serta peningkatan

akuntabilitas dan kapasitas fiskal daerah untuk mengurangi kesenjangan akses dan mutu pendidikan di Indonesia.

Pembahasan

Hasil sintesis menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Meskipun kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendidikan, mayoritas penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kapasitas fiskal antar daerah masih menjadi penyebab utama terjadinya ketimpangan pembiayaan pendidikan. Temuan ini terlihat dari dominannya artikel yang mengidentifikasi kesenjangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai faktor yang memengaruhi kemampuan daerah dalam menyediakan sarana pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, dan mengembangkan program pendidikan yang inovatif. Kondisi tersebut menyebabkan daerah dengan kapasitas fiskal tinggi mampu menyediakan layanan pendidikan yang lebih baik dibandingkan daerah

yang masih bergantung pada transfer fiskal pemerintah pusat.

Temuan tersebut sejalan dengan Teori Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan oleh Oates, yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal (Aithan et al., 2025). Namun, teori tersebut juga menekankan bahwa efektivitas desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah. Kamal et al. (2025), mengemukakan bahwa perspektif Fiskal Federalism, ketimpangan pembiayaan pendidikan terjadi karena kemampuan fiskal daerah tidak merata sehingga manfaat desentralisasi tidak dapat dirasakan secara setara oleh seluruh wilayah. Dari tabel hasil penelitian tersebut memperkuat argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa disparitas fiskal antar daerah berkontribusi terhadap perbedaan kualitas layanan pendidikan, akses pendidikan, dan belanja pendidikan per kapita.

Selain kapasitas fiskal, efektivitas transfer fiskal juga menjadi

isu penting dalam pembahasan ini. Sebagian besar penelitian menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum mampu mengurangi ketimpangan pembiayaan pendidikan secara optimal. Sumiyana & Effendi, (2024) menunjukkan bahwa sistem penganggaran pendidikan masih kurang adaptif dalam menciptakan pemerataan pendanaan sekolah, sedangkan Dian & Kirana, (2026) menemukan bahwa dominasi dana transfer justru meningkatkan ketergantungan fiskal daerah dan mengurangi insentif peningkatan PAD. Matin et al. (2025), menunjukkan bahwa otonomi daerah memberikan dampak positif berupa meningkatnya fleksibilitas dan efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak selalu menghasilkan dampak yang sama, melainkan dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kapasitas institusi, dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan

pembiayaan pendidikan tidak hanya terjadi antar daerah, tetapi juga antara sekolah negeri dan swasta serta antara sekolah umum dan madrasah. Apriliansyah et al. (2025), menemukan bahwa sekolah negeri di perkotaan memperoleh akses pendanaan yang lebih stabil dibandingkan sekolah swasta di pedesaan. Anwar (2023), menunjukkan bahwa transfer fiskal antarpemerintah belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan pendidikan karena masih terdapat perbedaan kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, Sumiyana & Effendi, (2024) juga menyimpulkan bahwa sistem penganggaran pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerataan alokasi dana pendidikan antarsekolah dan antarwilayah.

Berdasarkan temuan tersebut, implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah perlunya reformulasi sistem pembiayaan pendidikan melalui pendekatan *needs-based financing* yang mempertimbangkan jumlah peserta didik, tingkat kemiskinan, kondisi geografis, dan kebutuhan riil daerah.

Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme transfer fiskal berbasis kinerja, meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD, serta memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Dengan demikian, tujuan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan efisiensi, pemerataan akses, dan kualitas pendidikan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* terhadap 10 artikel periode 2022–2026, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya fleksibilitas dan partisipasi pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan, namun belum mampu mewujudkan pemerataan pembiayaan pendidikan secara optimal. Ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, distribusi anggaran yang belum berbasis kebutuhan, serta efektivitas transfer fiskal yang masih rendah menjadi faktor utama penyebab disparitas pembiayaan pendidikan. Akibatnya, kualitas

layanan, akses pendidikan, dan ketersediaan sarana pendidikan masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antarwilayah maupun antarjenis lembaga pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pembiayaan pendidikan melalui pendekatan *needs-based financing*, penguatan mekanisme transfer fiskal berbasis kinerja, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris pengaruh kebijakan transfer fiskal terhadap pemerataan mutu pendidikan di berbagai daerah dengan menggunakan data kuantitatif yang lebih luas dan indikator pemerataan pendidikan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aithan, I., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2025). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN APBD TAHUN 2024 *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Modern. Jurnal Ekonomi Dan Administrasi Modern*, 9(2), 8–21.
- Alfiansyah, I. (2026). DISPARITAS PEMBANGUNAN REGIONAL DALAM ERA DESENTRALISASI

- FISKAL : TINJAUAN LITERATUR TENTANG KONVERGENSI EKONOMI DAN. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(12), 411–419.
- Anwar, A. I. (2023). *Ekonomi Indonesia Kini dan Esok*.
- Apriliansyah, F., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Analisis Kesenjangan Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia: Studi Literatur Terhadap Perbedaan Akses Dan Kualitas Antara Sekolah Negeri dan Swasta di Daerah Perkotaan dan Pedesaan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 753–758.
- Arif, K., Ismail, I. A., Sriyolja, Z., & Yuda, S. (2025). Panduan Berbasis Bukti untuk Penulisan Artikel Ilmiah Bereputasi: Meta-Analisis Kualitatif pada Jurnal SINTA Level 1 – 6 Universitas Negeri Padang , Indonesia “ An Evidence -Based Guide for Writing Reputable Scientific Articles: A Qualitative Meta-Anal. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 5(10), 3128–3145.
<http://ojs.pustakabangsaindonesia.com/index.php/jhtk>
- Az-zahwa, A. A., Romadhona, H., Rahmah, A. A., Maynando, S. R., Evelin, Y. V., Chelsea, I., Naibaho, E., Fitrie, R. A., & Hidayat, M. F. (2026). Optimalisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Sebagai Instrumen Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan: Studi Tahun Anggaran 2025. *Jurnal Media Administrasi*, 11(1), 215–229.
- Bilqis, F., Salsabil, A. A., & Hildianti, D. (2026). Analisis Ketimpangan Akses Pendidikan antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia dalam Mendukung Pemerataan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(2), 4306–4316.
- Dian, K., & Kirana, R. T. (2026). Transfer Intergovernmental dan Disiplin Fiskal Pemerintah Daerah: Tinjauan Sistematis Moral Hazard dalam Sistem Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 02(03), 488–497.
- Farosa, Al Farina, S. D. A., Adawiyah, R., & S. (2026). Analisis Model Pembiayaan Pendidikan Sentralistik Dan Desentralistik Di Indonesia. *Comprehensive : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan*, 2(2), 156–164.
- Hayida-o, S., & Wayong, M. (2025). Perbandingan Sistem Dan Efektivitas Pembiayaan Pendidikan Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3), 4312.
- Kamal, S. A. R., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Indeks Keadilan Pembiayaan Pendidikan Antarprovinsi Di Indonesia: Analisis Disparitas Dan Implikasi Kebijakan Pendidikan Nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(4), 1041–1052.
<https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i4.5912>
- Marjoni, R. (2025). Reformulating the education financing model for equitable access and quality in the era of fiscal. *Ijafibs*, 13(2), 279–286.

www.ijafibs.pelnus.ac.id

- Marlina, S. (2025). Analisis literatur sebagai metode penelitian. *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Konstitusi*, 01(01), 1–7. <http://ojs.pustakabangsaindonesia.com/index.php/jhtk>
- Matin, H. N. A., Darmawan, C., Bestari, P., & S. (2025). INTEGRALISTIK Volume 36 Nomor 1 (2025): Januari 2025. *Integralistik*, 36(1), 51–69. <https://doi.org/10.15294/j473yx66>
- Meihadi, F., & Rosidin, U. (2026). Ketimpangan Otonomi Fiskal dalam Pembiayaan Sekolah dan Madrasah: Kritik Terhadap Desain Desentralisasi Pendidikan. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu*, 4(3), 4965–4973.
- Panggabean, J. S. E. A., Mahendra, A., & Setyaningsih, K. J. (2025). Peran Kapasitas Fiskal, Dependensi Fiskal pada Pemerintah Pusat, dan Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat: Studi Lintas Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan. *EQUILIBRIUM: Jurnal Bisnis & Akuntansi (EJBA)*, XIX(2), 279–290. <https://doi.org/10.61179/e>
- Ramadhani, A., Laura, P., Nicky, T., Diangera, A., Pratiwi, R. S., Erlangga, F., Saputra, D., Keguruan, F., Lampung, U., Jl, A., Soemantri, P., No, B., & Lampung, B. (2025). DINAMIKA DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DALAM PELAKSANAAN ASAS DESENTRALISASI ANTAR DAERAH DI INDONESIA Atikah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(12), 301–310.
- Runiasih, M., & Ahmad, M. (2025). Ketimpangan Pembiayaan Pendidikan Antar Daerah Di Indonesia: Kajian Literatur Terhadap Desentralisasi Fiskal Dan Pemerataan Akses. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 839–843.
- Sari, W. P., Farliana, N., Amirah, A. S., Amelia, T.V., & Abidah, D. A. H. (2026). Peran Investasi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 1166–1183.
- Sumiyana, S., & Effendi, R. (2024). Indonesia's education budgeting system denoting low adaptiveness: functionalism analysis. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2393870>
- Wahyudi, T., Nawawi, M., & Pohan, E. S. (2023). DESENTRALISASI FISKAL DAN EFISIENSI ANGGARAN: TINJAUAN SISTEMATIS. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 2(2), 32–49.
- Yusuf, A., & Hanif, M. (2025). Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Ketimpangan Akses di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(3), 153–166. <https://jipipi.org/index.php/jipipi153> Situswebjurnal: <https://jipipi.org/index.php/jipipi>